

SKRIPSI
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

OLEH:

MHD. RIDHO UTHAMA

2110112155

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Anton Rosari, S.H., M.H**
- 2. Sucy Delyarahmi, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

No.Reg: 04/PK-VIII/IV/2026

	No. Alumni Universitas	MHD. RIDHO UTHAMA	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat, Tgl Lahir : Bukittinggi, 7 Maret 2003	f. Tanggal Lulus : 14 Juli 2026	
	b. Nama Orang Tua : Rommi Bachri, Yanti O.	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	
	c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 4 Tahun 11 Bulan	
	d. PK : Hukum Agraria dan SDA	i. IPK : 3.63	
	e. No. BP : 2110112155	j. Alamat : Lima Puluh Kota, Sumatera Barat	

PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

(Mhd. Ridho Uthama, 2110112155, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 + xi Halaman, 2026)

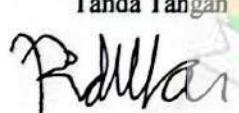
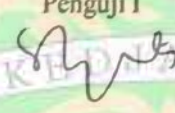
ABSTRAK

Kegiatan pertambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota terutama pada Batang Sinamar dan Jorong Belubus telah menarik perhatian masyarakat karena telah mengganggu kehidupan mereka. Selain itu, harapan masyarakat dalam upaya penindakan dan pengawasan terhadap tambang ilegal tersebut telah menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kondisi tersebut. Hal ini membuat perhatian masyarakat terhadap pengawasan kepada perusahaan tambang berizin menjadi lebih besar. Terutama setelah adanya perubahan kebijakan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merubah bentuk pengawasan yang dilakukan ini lebih terkonsentrasi di pemerintahan pusat menjadikan Menteri ESDM dan inspektur tambang menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Namun, melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2022 membuat peran pemerintah daerah dan Dinas ESDM juga menjadi vital melalui pendelegasian oleh menteri terhadap Pertambangan Mineral Bukan Logam. Selain itu, tahapan dalam pelaksanaan pengawasan sangat diperlukan dalam mengetahui bagaimana seluruh pihak yang ada bekerja sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga pelaksanaan dari pengawasan bisa dilakukan dengan baik. Tidak hanya pengawasan, tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak terkait juga sama pentingnya karena dengan adanya tindakan ini akan membantu perusahaan tambang yang ada untuk mengantisipasi terhadap sanksi administrasi yang ada. Tidak hanya itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan tambang juga sebagai penanda apakah perusahaan tambang yang ada telah melakukan kebijakan yang ada dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batuan di Kabupaten Lima Puluh Kota?, dan 2. Bagaimanakah tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil temuan pengawasan oleh inspektur tambang dan Dinas ESDM di Kabupaten Lima Puluh Kota?. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah yuridis-empiris, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah: 1. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan batuan di Kabupaten Lima Puluh Kota., dan 2. Tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil temuan pengawasan oleh inspektur tambang dan Dinas ESDM di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kata Kunci: Pengawasan, Pertambangan, Tindak Lanjut

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 14 Juli 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Mhd. Ridho Uthama	Dr. Syofianti, S.H., M.Hum	Romi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Internasional: Hendria Fithrina, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas:	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama: Tanda Tangan:

	No. University Alumni	MHD. RIDHO UTHAMA	No. Faculty Alumni
	a. Place, Date of Birth: Bukittinggi, 7 March 2003 b. Parents Name : Rommi Bachri, Yanti O. c. Faculty : Law d. Concentration : Agrarian Law & Natural R e. No. BP : 2110112155		f. Graduation Date : 14 July 2026 g. Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 Years 11 Months i. GPA : 3.63 j. Address : Lima Puluh Kota, Sumatera Barat

THE SUPERVISION OF ROCKS MINING ACTIVITIES IN LIMA PULUH KOTA REGENCY

(Mhd. Ridho Uthama, 2110112155, Concentration Programs Agrarian Law and Natural Resources, Faculty of Law, Andalas University, 69 + xi Pages, 2026)

ABSTRACT

Illegal mining activities in Lima Puluh Kota Regency, particularly in Batang Sinamar and Jorong Belubus have drawn public attention because they have disrupted people's lives. Furthermore, the public's expectations regarding enforcement and oversight of these illegal mines have raised many questions about the situation. This has heightened public attention on the oversight of licensed mining companies. This is especially true following policy changes under Law No. 6 of 2023, which shifted the focus of oversight to the central government, making the Minister of Energy and Mineral Resources and mining inspectors the parties responsible for conducting oversight. However, Presidential Regulation No. 55 of 2022 has made the roles of local governments and the ESDM Agency equally vital through the minister's delegation of authority regarding non-metallic mineral mining. Furthermore, clear steps in the oversight process are essential to ensure all parties operate in accordance with existing policies, thereby enabling effective oversight. Not only supervision, but the follow-up actions taken by relevant parties are equally important, as these measures help existing mining companies anticipate potential administrative sanctions. Furthermore, the government's follow-up actions toward mining companies serve as an indicator of whether these companies have properly implemented existing policies. The research questions in this study are: 1. How is the supervision of rock mining activities carried out in Lima Puluh Kota Regency?, and 2. What follow-up actions are taken regarding the findings of supervision by mining inspectors and the ESDM Office in Lima Puluh Kota Regency?. This study employs a juridical-empirical approach, with data collected through interviews and document analysis. The findings of this study are: 1. The implementation of oversight of rock mining activities in Lima Puluh Kota Regency, and 2. The follow-up actions taken regarding the findings of the oversight conducted by mining inspectors and the ESDM Office in Lima Puluh Kota Regency.

Keywords: *Supervision, Mining, Follow-up*

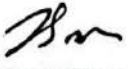
This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by 7 January 2026.

Examiner,

Signature 	Examiner I 	Examiner II 
Mhd. Ridho Uthama	Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum	Romi, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Departement of International Law: Hendria Fithrina, S.H., M.H.



Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University Under the Number:

	Faculty/University	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature:
No. Alumni University:	Name:	Signature: